

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

# ( I K U )

### SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016-2021

- NAMA SKPD : **KECAMATAN KARANGDADAP**
- URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- TUGAS POKOK : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- FUNGSI :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  3. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya;
  7. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, desa dan/atau kelurahan;
  8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
  9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
  10. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, meliputi aspek: Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

<b>TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PENJELASAN</b> (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)
<b><i>Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mencakup sistem, kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Tingkat Kecamatan.</i></b>		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, serta pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance di Tingkat Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Tingkat Kecamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai tupoksi kecamatan, sebagai OPD yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan tugas pelimpahan kewenangan bupati;</li> <li>- Untuk mengetahui kinerja dan perkembangan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan IKM secara periodik;</li> <li>- Sebagai tolok ukur dan gambaran bagi masyarakat, untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, serta bahan bagi instansi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</li> </ul> </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran</b> Total dari nilai persepsi per unsur <i>dikali</i> Nilai penimbang <i>dibagi</i> Total unsur yang terisi.  <i>Persepsi per unsur pelayanan:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan pelayanan</li> <li>2. Prosedur pelayanan</li> <li>3. Waktu penyelesaian pelayanan</li> <li>4. Biaya pelayanan</li> <li>5. Hasil pelayanan</li> <li>6. Kemampuan petugas</li> <li>7. Sikap petugas</li> <li>8. Maklumat pelayanan</li> <li>9. Sarana pengaduan</li> </ol> </li> <li>• <b>Tipe Pengukuran</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>Sumber Data</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey Kepuasan Masyarakat, yang meliputi hasil responden.</li> <li>- Buku layanan administrasi publik.</li> </ul> </li> </ul>

**Plt. CAMAT KARANGDADAP**

**Drs. SUGINO, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19741111 199602 1 001

**Target IKU Kecamatan Karangdadap Tahun 2016-2021**

<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	79,2	79,3	79,3	79,4	79,4	79,5

**Plt. CAMAT KARANGDADAP**

**Drs. SUGINO, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19741111 199602 1 001